

ANALISIS STRATEGI KOMUNIKASI PIHAK POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA

Aditya Putra¹

Universitas Cokroaminoto Makassar

Email: adityaputra.marzuki@gmail.com

Abstrak

Partisipasi politik pemilih pemula di Indonesia, khususnya di Kota Parepare, terbilang rendah. Hal ini menjadi perhatian ketika memasuki pemilu serentak pada tahun 2019 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia dimana pemilihan legislatif dan eksekutif dilaksanakan secara bersamaan. Oleh karena itu, partai politik baru, utamanya partai politik yang khusus menasar segmen pemilih pemula seperti Partai Solidaritas Indonesia perlu memiliki strategi komunikasi politik yang inovatif dan kreatif untuk menarik minat para pemilih pemula. Hasil analisis penelitian kemudian mengidentifikasi strategi komunikasi politik yang digunakan oleh Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare, Sulawesi Selatan, dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula sekaligus meningkatkan perolehan suara calon legislatif Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, baik pada tataran komunikator, pesan, saluran, komunikasi, serta efek dan feedback. Secara umum, usaha Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare untuk meraih suara pada pemilu serentak tahun 2019 dapat dikatakan tidak berjalan sesuai dengan yang ditargetkan, sebagai akibat dari hambatan yang dihadapi partai tersebut, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun yang berasal dari luar (eksternal). Namun secara khusus, kehadiran partai ini telah ikut meningkatkan partisipasi politik kelompok muda dan pemilih pemula di kota Parepare.

Kata kunci: Partisipasi Politik, Pemilih Pemula, Strategi Komunikasi, Komunikasi Politik

ANALYSIS OF POLITICAL PARTY'S COMMUNICATION STRATEGY IN INCREASING BEGINNER VOTER'S POLITICAL PARTICIPATION

Abstract

Political participation for young and new voters in Indonesia, particularly in Parepare, is fairly low. This has come in light during simultaneous election in 2019, which was the first election in Indonesia where legislative and executive legislation were held in the same time. Which is why, as a new political party, especially the ones that targetted new voters such as Partai Solidaritas Indonesia (Indonesia's Solidarity Party) needs to have an innovative and creative political communication strategy to attract the attentions of these new voters. This research analysis identifies these political communication strategy being used by Partai Solidaritas Indonesia branch Parepare, South Sulawesi, in their attempts to increase new voter's political participation as well to heightened PSI's vote, whether at the level of communicator, messages, channels, audience, and effect or feedbacks. By using observation and interview methods this research discovered that generally, Partai Solidaritas Indonesia's attempt to seize significant votes in the 2019's election were failing, due to several obstruction stems from internal causes as well as external ones. But in particular, the presence of this party has contributed to the increasing political participation of young and new voters in Parepare, South Sulawesi.

Keywords: *Political Participation, New Voters, Communication Strategy, Political Communication*

Korespondensi: Aditya Putra, S.IP., M.I.Kom. Universitas Cokroaminoto Makassar. Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Makassar 90000. No. HP, WhatsApp: 0811429100 Email: adityaputra.marzuki@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia telah melaksanakan Pemilihan Umum Serentak pada tahun 2019. Pemilihan Umum tersebut adalah yang pertama kalinya terjadi di Indonesia ketika pemilihan Presiden dan anggota DPR/D dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Terdapat 16 peserta partai politik yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pemilu tersebut, dan beberapa diantaranya adalah partai-partai baru. Menurut Miriam Budiarto (dalam Ellya Rosana, 2012) partai politik merupakan suatu kelompok yang teroganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Cheppy Hari Cahyono (dalam Sutanto, 2011) mengingatkan perlunya diperhatikan empat hal sehubungan dengan usaha memperjelas pengertian mengenai istilah partai politik. Keempat hal itu yaitu (1) Partai politik merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan politik dalam suatu masyarakat; (2) Partai politik mencurahkan perhatian untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya; (3) Partai politik berusaha mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok dan golongan masyarakat yang mempunyai pandangan berbeda-beda; dan (4) Partai politik merupakan lembaga perantara yang menghubungkan antara kekuatan-kekuatan sosial dan ideologi yang tumbuh dan berkembang

dalam masyarakat dengan pejabat-pejabat pemerintah maupun lembaga-lembaga kenegaraan

Menurut Haryanto (dalam Fitriyah, 2020), dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi; yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Selain itu partai politik disini juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan yang diperintah, antara pemerintah dengan masyarakat.

Yang kedua adalah sebagai sarana sosialisasi politik, yang diartikan sebagai proses melalui bagaimana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Sosialisasi politik mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain.

Yang ketiga adalah partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, yang berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitmen). Selain itu juga untuk

proses kaderisasi untuk melanjutkan kepemimpinan didalam partai tersebut.

Yang keempat adalah partai politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*). Dalam kehidupan masyarakat luas, dimana berbagai kepentingan bercampur baur tidak sedikit melahirkan konflik, semua beradu untuk mendapatkan kemenangan, disamping mudah terpicu konflik horizontal diantara warga masyarakat, juga tidak sedikit melahirkan konflik struktural penentangan terhadap kebijakan pemerintah. Pada kondisi demikian, partai politik harus dapat tampil sebagai penengah, menjadi peredam konflik. Berfungsi sebagai penyalur aspirasi rakyat kepada penguasa, dan menginformasikan kehendak penguasa politik kepada masyarakat.

Adapun partisipasi politik seperti yang dinyatakan Davis (dalam Irfandi Imam Chambali, 2017) memiliki fungsi untuk mempengaruhi penguasa, baik itu memperkuat ataupun untuk menekan, agar mereka memperhatikan ataupun memenuhi kepentingan pelaku partisipasi. Sedangkan bagi pemerintah itu sendiri, partisipasi politik dapat digunakan untuk mendukung program-program pemerintah dan menyuarakan aspirasi masyarakat, serta memberikan *feedback* maupun masukan bagi pemerintah untuk mengarahkan dan meningkatkan pembangunan. Dengan demikian, sasaran partisipasi politik tersebut adalah pemerintah serta instansi yang berwenang dalam mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi adalah salah satu prinsip mendasar dari good government. Partisipasi berasal dari bahasa latin *pars* yang

artinya bagian, dan *capere* yang bermakna mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Suharno (2004: hal.102-103) mengatakan bahwa dalam bahasa inggris, *partisipate* atau *participation* dapat dimaknai sebagai mengambil bagian atau peran; dengan demikian partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Partisipasi politik itu sendiri adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi, yang menjadi ciri khas dari modernisasi politik. Warga negara berhak untuk ikut berperan serta dalam menentukan keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah, ketika kebijakan tersebut mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (dalam Merina Aprilia, 2017) adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Oleh karena itu, tingginya tingkat partisipasi politik kemudian dapat menjadi indikator bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik, serta melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah akan menjadi tanda yang kurang baik, karena menunjukkan hal yang sebaliknya. Dalam melaksanakan fungsinya, partai politik perlu memiliki strategi, yang dalam konteks komunikasi politik merupakan usaha untuk mengatur pelaksanaan operasi komunikasi agar mampu mencapai target yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah, tetapi juga harus menunjukkan

taktik operasionalnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan komunikasi, maka komunikator harus mampu terlebih dahulu membuat strategi komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses penyampaian suatu pesan dalam bentuk simbol atau kode dari satu pihak kepada yang lain dengan efek untuk mengubah sikap atau tindakan. Seorang pakar perencanaan komunikasi Middleton (dalam Hafied Cangara, 2013: hal 61) membuat definisi dengan menyatakan strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran (media) penerima sampai pada pengaruh (efek) yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Dapat dikatakan bahwa strategi komunikasi pada hakikatnya adalah perencanaan (planning) dan manajemen (management) untuk mencapai tujuan. Dengan demikian, strategi komunikasi adalah tahapan nyata dalam rangkaian aktifitas komunikasi yang berbasis pada satuan teknik bagi pengimplementasian tujuan komunikasi. Adapun teknik adalah satu pilihan tindakan komunikasi tertentu berdasarkan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana yang meliputi metode, teknik, dan tata hubungan fungsional antara unsur-unsur dan faktor-faktor dari proses komunikasi guna kegiatan operasional dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, pada hakekatnya adalah sebuah perencanaan dan manajemen untuk mencapai sebuah tujuan.

Perencanaan strategi komunikasi politik memiliki peranan yang sangat esensial; selain untuk mengetahui arah kegiatan politik, juga untuk memperoleh dukungan publik secara

politik. Terdapat beberapa elemen perencanaan komunikasi politik yang perlu diperhatikan, yang diadopsi dari perencanaan Public Relation Harsono Suwando (dalam Akhirul Aminullah, 2010), yaitu (1) hasil yang diharapkan, yang terbagi dalam hasil utama serta hasil khusus. Berkenaan dengan hal ini, perlu dipertimbangkan tujuannya, yang tujuannya adalah information based (mis. mendidik atau sosialisasi) atau action-based (mis. Penggalangan dana, membentuk opini publik, dsb). Yang kedua, (2) khalayak yang menjadi sasarannya harus ditentukan sejelam mungkin untuk kemudian dibuat daftarnya secara berurutan sesuai dengan prioritas masing-masing; (3) Strategi atau metode dasar dalam bertindak, yang merupakan posisi umum atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai goal dan obyektif; (4) Taktik atau metode/alat khusus yang digunakan untuk menjelaskan perubahan manajemen yang dapat terjadi; (5) Anggaran dan waktu, yaitu bagaimana perencanaan yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia; (6) evaluasi atau proses penilaian untuk mengetahui keberhasilan atau kelemahan dari perencanaan yang telah dibuat, yang mana hal ini bisa dilakukan dalam bentuk survei opini atau analisis media.

Secara keseluruhan, partai politik membutuhkan suatu perencanaan strategis dalam melakukan hubungan dengan masyarakat, yang mana dalam hal ini adalah perencanaan komunikasi politik. Perencanaan komunikasi politik ini menyangkut produk politik yang akan dibawakan, pesan politik yang akan disampaikan, dan tampilan yang akan dimunculkan. Dengan

perencanaan yang memadai, maka sumber daya politik partai dapat ditata secara efektif serta efisien, sehingga akan terjadi sinergitas dan konsistensi dalam program kerja partai.

Partai Politik menggunakan alat utama dalam mencapai tujuannya, yaitu dalam bentuk komunikasi politik. Komunikasi politik terdiri atas 2 unsur, yaitu, “komunikasi” dan “politik”. Namun komunikasi politik memiliki konsep tersendiri, meskipun pada dasarnya merupakan gabungan dari kedua konsep tersebut. Hal ini dikarenakan kedua konsep tersebut memiliki obyek studi yang sama, yaitu manusia, sehingga terjadi irisan yang melahirkan konsep komunikasi politik. Komunikasi mengembangkan bidang kajian yang beririsan dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi dan psikologi, dan hal yang sama berlaku pula pada ilmu politik. Oleh karena itu, komunikasi politik tidak akan dapat dipahami jika dilepaskan dari aspek-aspek politik berikut segala problematiknya.

Politik berasal dari bahasa Inggris politics, yang berakar dari Bahasa Yunani seperti politics (menyangkut warga negara), polities (seorang warga negara), polis (kota negara), dan politeia (kewargaan). Pemahaman seperti ini yang kemudian mengilhami munculnya tafsiran politik sebagai tindakan-tindakan, termasuk tindakan komunikasi, atau relasi sosial dalam konteks bernegara atau dalam urusan publik.

David Easton (dalam Carolyn C. James, 2016) mendefinisikan politik sebagai “a process those developmental processes through which person acquire political orientation and patterns of behavior”. Dalam definisi ini David Easton lebih

condong kepada politik sebagai suatu proses dimana seseorang memperoleh orientasi politik dan pola perilaku tertentu. Mengenai komunikasi politik ini (political communication), Kantaprawira (dalam Erwin Jusuf Thaib, 2019) kemudian memfokuskan pada kegunaannya, yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran intra golongan, institusi, asosiasi, ataupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Oleh karenanya, hanya komunikasi yang mampu memungkinkan tercapainya pengaruh yang diinginkan, dengan adanya proses penyampaian dan penerimaan ide-ide serta kebijakan politik.

Lasswell (dalam S.P Varma, 2016: 258) sendiri memandang orientasi komunikasi politik telah menjadikan dua hal sangat jelas: pertama, bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan, dimana nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk dalam dan oleh proses perilaku yang sesungguhnya merupakan suatu bagian; dan kedua, bahwa komunikasi politik bertujuan menjangkau masa depan dan bersifat mengantisipasi serta berhubungan dengan masa lampau dan senantiasa memperhatikan kejadian masa lalu.

Sedangkan R.S. Sigel (dalam Leonardo Morlino, 2020) memberikan pandangan sebagai berikut: “Political socialization refers to the learning process, by which the political norms and behavior acceptable to an ongoing political system are transmitted from generation to generation.” Dari batasan Sigel ini menunjukkan bahwa sosialisasi politik bukan hanya menitik-

beratkan pada penerimaan norma-norma politik dan tingkah laku pada sistem politik yang sedang berlangsung, tapi juga bagaimana mewariskan atau mengalihkan nilai-nilai dari suatu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam proses politik, komunikasi politik akan berfungsi sebagai jembatan untuk proses penyampaian pesan. Kegiatan ini terjadi pada semua level dalam masyarakat, yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi di antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan setiap individu terhadap informasi, utamanya yang menyangkut fungsi mereka. Maka dalam kerangka fungsi seperti ini, Rush dan Althoff (dalam Anang Anas Azhar, 2018) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari suatu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik.

Dalam ilmu komunikasi, kerangka komunikasi politik adalah sebagaimana yang digambarkan oleh Harold Laswell, yaitu *who told what, in what channel, to whom, and with what effects*: siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat apa. Paradigma ini mengklaim bahwa unsur-unsur komunikasi tersebut berlaku dalam setiap proses komunikasi, dan berlaku inheren dalam komunikasi politik.

Komunikasi politik merupakan prasyarat yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain. Galnoor (dalam Edhy Prabowo, 2016) menyebutkan bahwa komunikasi politik

merupakan infrastruktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran.

Unsur yang ada dalam komunikasi politik sendiri tidaklah berbeda dengan unsur-unsur komunikasi pada umumnya, dimana secara pokok terdiri dari komunikator (penyampai pesan), message (pesan), dan komunikan (penerima pesan). Komunikasi politik merupakan pembicaraan politik yang melibatkan unsur-unsur komunikasi dengan akibat-akibat politik tertentu. Unsur-unsur tersebut yang pertama (1) adalah komunikator atau aktor penyelenggara komunikasi. Komunikator dalam proses komunikasi politik memiliki tugas untuk membentuk opini publik, dengan memanfaatkan pesan dalam bentuk percakapan sebagai proses negosiasi yang berfungsi untuk menyelaraskan pemahaman bersama antara dua pihak atau lebih tentang makna dan sikap yang seharusnya dilakukan. Namun dalam kenyataannya, isi atau pesan komunikasi politik berfungsi bukan hanya untuk membentuk pemahaman bersama, namun juga dapat menimbulkan kemungkinan konflik. Pesan politik pada hakikatnya mengandung paradoks, yaitu dapat menyelesaikan konflik, namun juga dapat membuka konflik. Adapun media politik dalam proses komunikasi politik dapat digunakan bukan hanya untuk kepentingan tertentu, namun juga bisa dimanfaatkan untuk menysasar publik tertentu.

Dan Nimmo (dalam Holli A. Semetko, 2012) kemudian mengidentifikasi tiga kelompok

yang dapat berperan sebagai komunikator politik, yaitu politikus (pols), professional (pros) dan aktivis (vois). Sebagai komunikator politik, politikus dapat berperan sebagai wakil dari suatu kelompok, dengan demikian pesan-pesan politikus tersebut kemudian diatur untuk mencapai tujuan politik tertentu. Politikus juga dapat berperan sebagai ideolog dalam kegiatan komunikasi politik. Sebagai komunikator politik yang berkecenderungan sebagai ideolog, politikus akan mengupayakan terwujudnya kebijakan yang berdampak luas, mengusahakan reformasi dan bahkan mendukung perubahan revolusioner.

Dan Nimmo juga menyatakan bahwa para pemimpin organisasi ataupun juru bicara partai-partai politik pada dasarnya adalah pihak-pihak yang menciptakan opini publik, karena mereka berhasil membuat sejumlah gagasan yang mula-mula ditolak, kemudian dipertimbangkan, dan akhirnya diterima publik. Sikap mereka terhadap khalayak serta martabat yang diberikannya kepada mereka sebagai manusia dapat mempengaruhi komunikasi yang dihasilkannya, baik sebagai sumber individual maupun kolektif. Oleh karena itu, komunikator politik merupakan pihak potensial yang ikut menentukan arah sosialisasi, bentuk-bentuk partisipasi, serta pola-pola rekrutmen massa politik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Yang kedua (2) adalah pesan, karena pada dasarnya, komunikasi adalah seni atau “art” dalam menyampaikan suatu pesan secara demikian rupa, agar dapat menimbulkan dampak tertentu yang diinginkan oleh komunikator terhadap komunikan. Pesan yang disampaikan

komunikator sendiri adalah sebuah ungkapan yang dijadikan sebagai panduan pemikiran dan perasaan, yang dapat terwujud dalam bentuk ide, informasi, ancaman, anjuran, dorongan, dan lain sebagainya. Adapun pesan dalam komunikasi politik itu dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain. Pesan dalam kegiatan komunikasi politik diklasifikasikan oleh Nimmo (dalam Hendra Alfani, 2015) menjadi tiga hal, yang pertama adalah pembicaraan tentang kekuasaan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain dengan janji dan ancaman. Pembicaraan kekuasaan adalah suatu usaha untuk mendapatkan kekuasaan dengan jalan menyampaikan pesan-pesan politik yang berisi janji-janji atau ancaman dalam suatu kegiatan komunikasi politik. Yang kedua adalah pembicaraan pengaruh. Pesan dalam komunikasi politik dimaksudkan untuk mempengaruhi khalayak dengan berbagai cara, antara lain melalui nasehat, dorongan, permintaan, maupun peringatan. Tujuan dari pembicaraan pengaruh adalah berusaha memanipulasi persepsi atau pengharapan orang lain terhadap kemungkinan mendapat untung atau rugi. Dan yang ketiga adalah pembicaraan otoritas. Pesan dari pembicaraan otoritas adalah memberi perintah. Pembicaraan ini mengharuskan munculnya rasa kepatuhan khalayak kepada para pemimpinnya. Dengan demikian sumber-sumber otoritas sangat berbeda-beda apabila khalayak mempunyai kapabilitas yang tinggi maka pesan akan lebih mudah diterima apabila disampaikan oleh komunikator yang mempunyai latar belakang sosial yang sejenis. Unsur ketiga (3) adalah media atau saluran/channel, tempat berlangsungnya

proses penyampaian pesan. Apabila dilihat secara luas, saluran komunikasi terdiri atas lambang-lambang, kombinasinya, dan berbagai teknik secara media yang digunakan untuk berbicara dengan khalayak. Dengan demikian, saluran komunikasi adalah sarana yang memudahkan penyampaian pesan. Akan tetapi, saluran komunikasi lebih dari sekedar titik sambungan, namun terdiri atas pengertian bersama tentang siapa berbicara kepada siapa, dalam keadaan bagaiman serta sejauh mana dapat dipercaya. Dan Nimmo (2005) mengajukan tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi politik. Ketiga jenis media tersebut adalah: media massa, media komunikasi interpersonal dan media komunikasi organisasi. Ada dua bentuk saluran komunikasi massa, masing-masing berdasarkan tingkat langsungnya komunikasi satu kepada banyak. Bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti bila seorang kandidat politik berbicara di depan rapat umum atau ketika seseorang berbicara di depan khalayak besar atau konferensi pers. Bentuk yang kedua terjadi jika ada perantara ditempatkan di antara komunikator dan khalayak. Di sini media, teknologi, sarana komunikasi lainnya turut serta. Batas media massa dari penjelasan bersifat longgar tidak hanya berhenti pada media elektronik dan cetak, tetapi juga media-media komunikasi yang berbentuk rapat-rapat besar dan pertemuan-pertemuan.

Sedangkan media komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan satu kepada satu. Media (saluran) ini dapat berbentuk tatap muka maupun perantara. Media komunikasi

ketiga adalah komunikasi organisasi yang menggabungkan penyampaian satu kepada satu dan satu kepada banyak. Akan tetapi komunikasi politik satu kepada satu yang melibatkan organisasi jarang dilakukan. Oleh sebab itu saluran komunikasi satu kepada banyak dengan melalui perantara dijadikan alternatif sebagai media komunikasi organisasi. Bentuk dari komunikasi perantara ini adalah penyebaran pamflet dan tidak jarang yang sering terjadi di Indonesia adalah penyampaian pesan komunikasi politik melalui pembagian atribut seperti kaos-kaos maupun sembako kepada khalayak.

Unsur keempat (4) adalah khalayak, atau menurut Dan Nimmo (2010) merupakan sejumlah orang yang heterogen, yang menjadi khalayak komunikasi politik setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik. Arthur F. Bentley (dalam Dan Nimmo, 2010) memberikan pengertian yang mengarah pada pemahaman tentang khalayak sebagai bagian tertentu dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan tidak sebagai massa fisik yang terpisah dari masa yang lain, tetapi sebagai “kegiatan massa yang tidak menghalangi orang yang berpartisipasi di dalamnya untuk berpartisipasi juga dalam banyak kegiatan kelompok yang lain”. Bila didefinisikan sebagai suatu kegiatan, suatu kelompok terdiri atas orang-orang yang melakukan kegiatan yang dipersatukan tanpa menghiraukan apakah yang mendasari kegiatan itu berupa organisasi formal atau tidak formal. Artinya orang bergabung untuk bertindak dalam proses opini meskipun tidak diorganisasi secara formal membentuk kelompok atau opini publik.

Khalayak dibagi atas khalayak yang terorganisir, tidak terorganisir dan khalayak umum (khalayak banyak) serta publik kepemimpinan. Khalayak terorganisasi terbagi dalam tiga kelompok, publik atentif, publik berpikiran isu dan publik ideologis.

Publik atentif merupakan kumpulan warga negara yang dibedakan berdasarkan tingkatnya dalam keterlibatan politik, informasi, perhatian dan berpikiran kewarganegaraan. Publik atentif sering bermain sebagai pemuka pendapat, yakni orang-orang yang sering dimintai pendapatnya oleh warga negara lain yang kurang informasi dan kurang keterlibatannya dalam politik. Publik atentif menempati posisi penting dalam proses opini karena mereka bertindak sebagai saluran komunikasi interpersonal dalam aliran pesan timbal balik antara pemimpin politik dan publik umum. Publik atentif juga bergabung dengan pemimpin politik sebagai pembawa konsensus dan sebagai perantara antara khalayak umum dengan pimpinan politik.

Publik berpikiran isu adalah sekumpulan khalayak yang memusatkan perhatian pada suatu isu tertentu. Sekumpulan khalayak yang memusatkan perhatian pada isu yang sama kemudian membentuk publik khusus, publik yang pada akhirnya bisa–tetapi tidak perlu–mengatur diri menjadi kelompok formal.

Sedangkan khalayak (public) ideologis adalah orang yang memiliki kepercayaan yang relatif tertutup, yang nilai-nilainya adalah suka dan tidak suka dipegang erat-erat. Sistem kepercayaan yang terdapat dalam publik ideologis konsisten secara internal. Mereka menganut

kepercayaan dan atau nilai yang secara logis melekat, tidak berkontradiksi satu sama lain

Unsur yang kelima (5) adalah efek atau dampak sebagai pengaruh dari pesan. Dalam komunikasi politik, efek yang diharapkan adalah meningkatnya dukungan ataupun jumlah anggota partai politik, sedangkan pada pemilihan umum dan pilkada, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi politik adalah pemberian suara kepada partai atau calon yang diusungnya.

Adapun fungsi komunikasi politik secara mendasar dapat dibedakan kepada dua bagian, yang pertama fungsi komunikasi politik yang berada pada struktur pemerintah (suprastruktur politik) atau disebut pula dengan istilah *the governmental political sphere*, berisikan informasi yang menyangkut kepada seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Isi komunikasi ditujukan kepada upaya untuk mewujudkan loyalitas dan integritas nasional untuk mencapai tujuan negara yang lebih luas. Kedua, fungsi yang berada pada struktur masyarakat (infrastruktur politik) yang disebut pula dengan istilah *the sociopolitical sphere*, yaitu sebagai agregasi kepentingan dan artikulasi kepentingan, dimana kedua fungsi tersebut sebagai proses komunikasi yang berlangsung di antara kelompok asosiasi dan proses penyampaian atau penyaluran isi komunikasi terhadap pemerintah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.

Apabila dilihat secara umum, maka fungsi komunikasi politik pada hakekatnya adalah sebagai jembatan penghubung antara suprastruktur dan infrastruktur yang bersifat

interdependen dalam ruang lingkup negara. Komunikasi ini bersifat timbal balik atau dalam pengertian lain saling merespons sehingga mencapai saling pengertian dan diorientasikan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dengan demikian, partai politik memiliki 2 fungsi komunikasi politik, yaitu sebagai penyampai aspirasi masyarakat kepada pemerintah, serta fungsi sosialisasi kebijakan politik pemerintah kepada masyarakat. Kedua fungsi ini dapat berjalan sendiri-sendiri maupun beriringan, tergantung pada kondisi politik yang terjadi pada saat itu.

Salah satu partai baru yang kemudian menjadi pusat perhatian masyarakat adalah Partai Solidaritas Indonesia. Partai yang berdiri pada 16 November 2014 ini diketuai oleh Grace Natalie, seorang mantan pembawa acara berita dan jurnalis. Partai Solidaritas Indonesia resmi menjadi peserta Pemilu tahun 2019 setelah memenuhi syarat administrasi dan verifikasi faktual secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum dan merupakan satu-satunya partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pemilihan Presiden tahun 2014.

Partai Solidaritas Indonesia cabang Kota Parepare sendiri mulai aktif melaksanakan kegiatan kampanye politik pada tahun 2017, atau pada saat menjelang dilaksanakannya Pemilihan Walikota Parepare. Setelah menetapkan dukungannya terhadap pasangan no urut 1, yaitu petahana walikota Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H. dan H. Pangerang Rahim, PSI Kota Parepare kemudian mulai aktif mengikuti kampanye politik yang diselenggarakan oleh

koalisi partai politik pendukung pasangan petahana tersebut. Berdasarkan observasi lapangan dan publikasi pada media sosial milik DPD PSI Kota Parepare, kegiatan politik DPD PSI Parepare tersebut didominasi oleh pemuda ataupun orang-orang yang berumur dibawah 40 tahun. Ada alasan tertentu mengapa kelompok pemilih pemula selama ini hanya dijadikan ceruk suara alihalih sebagai kelompok potensial pengurus partai ataupun sebagai anggota legislatif; dimana kelompok umur tersebut dipandang masih labil, kurang mampu berpolitik, maupun akibat karakteristik khas orang muda yang dianggap tidak cocok untuk proses politik. Disisi lain, rendahnya partisipasi politik pemilih pemula juga diakibatkan salah satunya oleh kurangnya pendidikan politik yang mereka peroleh. Ini menunjukkan kegagalan partai politik lama dalam melakukan salah satu fungsi partai politik, yaitu sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik. Data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Parepare memperlihatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi pemilih pemula pada pemilu yang berlangsung pada tahun-tahun sebelum kehadiran Partai Solidaritas Indonesia, yaitu pilgub 2007, pileg dan pilpres2009, pilgub 2013, dan pileg 2014. Kurangnya partisipasi politik kelompok muda juga tampak pada anggota legislatif yang menjabat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Parepare saat ini yang didominasi oleh kelompok umur 40 tahun keatas. Oleh karena itu, sebagai partai politik baru yang menysasar kelompok pemilih pemula, DPD PSI Kota

Parepare perlu memiliki strategi komunikasi yang spesifik dan inovatif dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih pemulayang menjadi targetnya, sekaligus untuk memenuhi tujuan PSI dalam memperoleh suara demi meraih kursi di DPRD Kota Parepare.

Namun pemilu serentak tahun 2019, yang merupakan pemilu serentak pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia, tentu menghadirkan dinamika baru yang belum pernah dihadapi sebelumnya. Terlebih lagi untuk partai politik baru seperti PSI. Persoalan dan tantangan yang muncul, baik dari internal maupun eksternal partai tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan PSI dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih pemula. Dan semua itu harus dihadapi oleh para pengurus dan anggota DPD PSI Kota Parepare yang maju menjadi calon anggota legislatif, sebagai ujung tombak kegiatan politik PSI kota Parepare. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi komunikasi politik PSI Kota Parepare untuk meningkatkan partisipasi politik kelompok pemilih pemula di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, dan apa faktor penghambat dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula tersebut.

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya

merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang menurut Mukhtar (2013) adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu, dengan prosedur pemecahan masalah yang menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Melalui metode ini penulis mencoba mengungkapkan data, informasi, dan kendala terkait strategi komunikasi politik PSI Kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula di kota Parepare, Sulawesi Selatan.

b. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Pengertian lain dari populasi menurut Hadar Nawawi (1987) adalah keseluruhan atau totalitas objek yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Dalam hal ini yang menjadi populasi adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Parepare. Subjek penelitian ini adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui strategi komunikasi politik PSI kota Parepare dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

2. Sampel

Sampel adalah kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi

sehingga sifat dan karakteristik populasi juga dimiliki oleh sampel. Sampel adalah contoh, representasi, atau wakil dari satu populasi yang cukup besar jumlahnya. Penarikan sampel kemudian menggunakan teknik Snowball Sampling. Tujuan peneliti mengambil sampel ini adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objeknya dengan jalan mengamati sebagian saja dari populasi. Pengambilan sampel ini dilakukan karena seringkali tidak memungkinkan untuk mengamati segenap pengurus dari populasi yang besar jumlahnya. Sampel yang dikehendaki dianggap representatif dapat menjawab permasalahan yang dihadapi sesuai tujuan penelitian ini pada tataran operasionalnya, peneliti terfokus pada pengurus PSI Kota Parepare, anggota biasa, dan anggota PSI kota Parepare yang menjadi calon legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019, yaitu :

1. Pengurus DPC PSI Kota Parepare
Adriawan Natsir Susanto
2. Pengurus DPC PSI Kota Parepare Ahmad
Kamal
3. Pengurus DPD PSI Kota Parepare Jonas
Barobo
4. Pengurus DPD PSI Kota Parepare Dedi
Iswadi
5. Calon Legislatif Daerah Pemilihan
Soreang Muh. Syaifullah S
6. Anggota PSI Kota Parepare Mifta Novianti
Putri
7. Anggota PSI Kota Parepare Muh. Ammar

c. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan memerlukannya. Dalam hal ini penulis sebagai instrumen utama penelitian menjadikan observasi lapangan sebagai data utama, ditunjang oleh keterangan dari pengurus DPD , DPC, calon legislatif, dan anggota PSI Kota Parepare sebagai informan dalam mencari data-data yang diperlukan dan dibutuhkan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah jadi atau dipublikasikan untuk umum oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah dan menyajikan. Data sekunder disebut juga data tersedia. Data sekunder merupakan data pendukung yang fungsinya memperkuat data primer, yang diperoleh dari buku-buku, literature seperti buku strategi sosialisasi politik, strategi partai politik, serta karya-karya, dokumentasi, dan media internet terkait objek penelitian. Berdasarkan penjelasan ini maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pengurus dan anggota PSI Kota Parepare.

d. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu:

1. Metode observasi lapangan

Observasi pada dasarnya adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha

pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Sedangkan menurut Kamus Ilmiah Populer (dalam Suardeyasri, 2010) kata observasi berarti suatu pengamatan yang teliti dan sistematis, dilakukan secara berulang-ulang. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana (dalam Suardeyasri, 2010) adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi lapangan selama proses kampanye PSI Kota Parepare, dan ikut terlibat sebagai anggota PSI agar dapat mengikuti rapat-rapat dan kampanye secara langsung

2. Metode Wawancara

Menurut Sugiyono (2013), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi awal untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara memiliki tujuan untuk menampilkan konstruksi saat ini dalam suatu kerangka tentang para pribadi, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, dsb; kemudian hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan yang dapat timbul di masa yang akan datang. Responden yang diwawancarai juga berperan sebagai pengamat yang kemudian memberikan jawaban kepada peneliti mengenai gejala-gejala yang sedang diteliti. Peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan

secara langsung antara peneliti dengan informan menggunakan metode seperti yang dituliskan oleh Pawito (2011), yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*). Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dengan teknik snowball sampling yaitu pewawancara tidak menetapkan jumlah responden. Apabila responden pertama dirasa sudah cukup memberikan semua data yang dibutuhkan, maka wawancara kembali kepada responden kedua. Wawancara tersebut ditunjukkan kepada para pengurus dan anggota Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare, dengan tujuan untuk mengetahui data yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik partai PSI untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula.

3. Metode Dokumentasi

Menurut Nawawi (1998), metode dokumentasi adalah “mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, hukum-hukum, jurnal, buku dokumentasi serta melalui media elektronik yaitu internet yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini”. Metode dokumentasi dijadikan sebagai metode pelengkap, dimana Peneliti melakukan pencatatan terhadap data yang dianggap penting dan berkaitan dengan pola dan strategi kampanye Partai Solidaritas Indonesia, baik kota Parepare maupun di wilayah lain, untuk selanjutnya disusun dan dianalisis.

e. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh di lapangan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan mencari gambaran yang sistematis, faktual

dan aktual mengenai fakta-fakta dan kegiatan yang terkait dengan strategi kampanye dan pola komunikasi politik PSI Kota Parepare kepada pemilih pemula

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai partai politik baru, PSI kota Parepare pada dasarnya mengikuti kebijakan pengurus pusat partai. Pada event pembekalan akbar calon anggota legislatif PSI Se-Sulawesi Selatan tanggal 22 September 2018 di Hotel Karebosi Kondotel (makassarterkini.id, 2019) yang dihadiri oleh pengurus pusat PSI, telah dijabarkan beberapa arahan mengenai model komunikasi politik PSI dalam menghadapi pemilu serentak. Pada presentasinya, arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Komunikator

Pada tataran aktor pembawa pesan atau komunikator, yang menjadi komunikator adalah anggota PSI secara keseluruhan, dengan calon anggota legislatif yang maju sebagai ujung tombaknya.

b. Pesan

Pada tingkatan pesan, yang menjadi fokus pesan pada dasarnya adalah muatan-muatan yang membawa kesan positif terhadap para calon anggota legislatif PSI secara khusus, dan terhadap Partai Solidaritas Indonesia secara umum. Sesuai dengan tagline PSI, yaitu anti korupsi dan anti intoleransi, maka pesan-pesan politik anggota PSI berpusat pada hal tersebut. Anggota PSI diarahkan untuk membentuk opini publik bahwa PSI adalah partai baru

yang dapat menjadi anti-tesa partai-partai lama yang korup dan mendukung intoleransi. Adapun mengenai pesan-pesan politik lainnya yang akan diangkat, diserahkan sepenuhnya pada para anggota PSI di daerah masing-masing, selama tidak menyalahi ketentuan partai.

c. Media

Terdapat beberapa media atau saluran yang menjadi acuan untuk digunakan dalam komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia, yaitu media konvensional seperti surat kabar, majalah, televisi, serta media online seperti media sosial ataupun jejaring pertemanan. Selain itu, PSI juga mengikuti metode konvensional partai-partai politik lainnya dengan menggunakan atribut seperti baju kaos, bendera, pamlet, dan lain sebagainya, untuk menyebarkan pesan politik dan sebagai media kampanye politik.

d. Khalayak

Yang menjadi sasaran utama komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia adalah kelompok muda dan para pemilih pemula. Segmentasi ini konsisten dengan image branding yang dilakukan oleh PSI dengan mengklaim sebagai partai anak muda. Namun hal ini tidak menjadikan PSI tidak menysasar kelompok masyarakat umum, sebab para calon anggota legislatif PSI diarahkan untuk meraup suara sebanyak-banyaknya melalui semua segmen pemilih yang ada, tentunya yang sejalan dengan visi misi dan tujuan partai tersebut.

e. Efek

Seperti umumnya, efek yang diharapkan dari komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia adalah bertambahnya dukungan terhadap partai tersebut, baik dalam bentuk simpati masyarakat ataupun penambahan jumlah anggota/kader partai. Adapun efek jangka pendek yang diinginkan adalah bertambahnya jumlah pemilih yang akan memilih para calon anggota legislatif dari partai ini.

Dengan menggunakan konsep tersebut, hasil penelitian di lapangan menemukan beberapa fakta sebagai berikut:

a. Komunikator

Sesuai dengan arahan dari pusat, ujung tombak yang menjalankan peran komunikator adalah para calon anggota legislatif yang akan mengikuti pemilihan legislatif serentak pada tahun 2019. Demikian pula dengan PSI Kota Parepare. Ada 10 orang calon anggota legislatif yang kemudian didaftarkan oleh PSI kota Parepare untuk mengikuti pileg 2019, yaitu:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Daerah Pemilihan
1	Sofyan Setiawan	laki-laki	I(Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
2	Sukrianti	perempuan	I(Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
3	Andi Irvan R	laki-laki	I(Kecamatan Bacukiki-Bacukiki Barat)
4	Muh. Yusran Hadysurya	laki-laki	II(Kecamatan Ujung)
5	Muh. Iqbal Usman	laki-laki	II(Kecamatan Ujung)
6	Devi Angrainy	perempuan	II (Kecamatan Ujung)

7	Nurafni	perempuan	III(Kecamatan Soreang)
8	Muh. Syaifullah S.	laki-laki	III(Kecamatan Soreang)
9	Irfan Nurhayati Herman	laki-laki	III(Kecamatan Soreang)
10	Yuliana	perempuan	III (Kecamatan Soreang)

Sumber: hasil penelitian, 2019

Metode penjaringan bakal calon legislatif PSI, berdasarkan situs resmi PSI, merupakan sistem terbuka, dimana para bacaleg akan diseleksi berdasarkan hasil wawancara dengan panelis-panelis untuk mengukur keahlian dan kompetensi mereka (PSI.id, 2019). Namun pada PSI kota Parepare, metode penjaringan bacaleg tidak mengikuti hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa calon anggota legislatif itu sendiri, proses pemilihan bacaleg kota Parepare tidak melalui proses seleksi oleh panelis sesuai bidang keahlian masing-masing, melainkan hanya melalui proses pendaftaran. Para bacaleg yang didaftarkan tersebut, selain memenuhi kriteria utama bacaleg PSI yaitu berumur dibawah 35 tahun, kemudian juga memenuhi persyaratan minimal pendaftaran caleg di Komisi Pemilihan Umum, yaitu memenuhi keterwakilan perempuan (1 orang caleg perempuan untuk 2 orang caleg laki-laki). Adapun persyaratan keahlian dan kompetensi tidak menjadi ketentuan utama dalam proses penjaringan tersebut, sesuai dengan hasil temuan lapangan.

b. Pesan

Pesan komunikasi politik PSI kota Parepare tampak menekankan pada muatan “pemuda”, anti korupsi” dan “anti intoleransi”,

yang dibungkus dalam gaya komunikasi anak muda atau generasi milenial. Muatan tersebut dibawakan secara umum, termasuk ketika mengomentari isu-isu relevan yang tengah terjadi atau menjadi perbincangan umum pada saat itu.

c. Media

Komunikasi politik Partai Solidaritas Indonesia kota Parepare dan para calon anggota legislatifnya pada dasarnya menggunakan media-media yang tersedia, baik itu media konvensional maupun media sosial. Namun media sosial dan portal berita online memperoleh porsi yang jauh lebih besar dibandingkan media konvensional seperti iklan politik ataupun publikasi caleg di koran atau surat kabar. Para caleg tersebut maupun DPD PSI Kota Parepare pada umumnya menggunakan laman media sosial mereka untuk melakukan kampanye ataupun mengunggah narasi-narasi politik mereka. Para caleg melakukan komunikasi selain secara tidak langsung, juga melakukan komunikasi tatap muka atau langsung, umumnya dalam bentuk *canvassing* atau metode *door-to-door*; yaitu dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga yang menjadi konstituennya. Yang unik pada model komunikasi para caleg PSI kota Parepare adalah menitik-beratkan pula pada pendekatan ke komunitas-komunitas anak muda ataupun organisasi yang mereka ikuti. Hal ini dikarenakan sebagai anak muda, mereka aktif berorganisasi maupun berkumpul dengan anak-anak muda lainnya yang memiliki minat atau kesamaan hobi. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi salah satu pilihan, karena selain ekonomis, juga kemudahan dalam berkomunikasi

dikarenakan kedekatan mereka dengan khalayak atau basis massa yang disasar.

d. Khalayak

Yang menjadi target atau sasaran komunikasi politik para caleg PSI kota Parepare dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keluarga dan kerabat dekat, kelompok pemilih pemula yang pada umumnya terdiri atas teman-teman dan rekan organisasi/kerja mereka, serta masyarakat umum.

e. Efek

Efek yang diharapkan dapat tercapai oleh komunikasi politik caleg PSI kota Parepare dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Efek jangka panjangnya adalah sosialisasi mengenai keberadaan, visi misi, serta muatan-muatan positif mengenai PSI kepada masyarakat umum kota Parepare, sehingga kedepannya masyarakat tersebut akan bersimpati dan mendukung PSI, baik secara tidak langsung maupun secara langsung. Selain itu, yang menjadi tujuan efek juga dapat dibagi menjadi 2, yaitu efek kepada PSI sebagai sebuah partai politik, dan efek kepada para caleg sebagai individu. Sebab para caleg tersebut merupakan orang-orang yang baru berkecimpung di dunia politik, sehingga mereka perlu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan popularitas mereka di dunia politik lokal.

f. Alokasi Dana dan Waktu

Salah satu komponen penting dalam perencanaan komunikasi politik adalah dana operasional dan waktu yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan pernyataan dari ketua PSI kota Parepare Muh. Iqbal Usman, bahwa PSI kota Parepare tidak mengelola dana

operasional untuk kegiatan kampanye baik partai maupun perorangan caleg, maka sebagai konsekuensinya dana operasional menjadi tanggung-jawab masing-masing calon anggota legislatif.

g. Strategi Dan Taktik

Seperti halnya pada alokasi dana dan waktu, DPD PSI kota Parepare menyerahkan sepenuhnya permasalahan strategi dan taktik komunikasi kepada masing-masing caleg. Oleh sebab itu, ada perbedaan strategi tiap-tiap caleg yang ditemui di lapangan. Berdasarkan hasil observasi, PSI kota Parepare tidak pernah melangsungkan rapat akbar atau kampanye akbar di Kota Parepare. Mayoritas caleg PSI kota Parepare melakukan kampanye tatap muka secara langsung, berkeliling ke rumah-rumah warga, ataupun menyebarkan stiker dan pamphlet; termasuk juga menggunakan kendaraan roda 4 sebagai media kampanye dengan menempelkan stiker kampanye. Beberapa caleg juga melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam yang terjadi pada tahun tersebut, kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan politik publik seperti salah satunya tudang sipulung lintas partai (pijarnews.com, 2019) serta konsensus bersama caleg muda menolak *money politics* (Makassar.tribunnews, 2019).

h. Evaluasi

Selama periode kampanye hingga selesainya pileg dan pilpres serentak tahun 2019, PSI Kota Parepare tidak pernah mengadakan evaluasi proses kampanye maupun komunikasi politik yang berlangsung. Segala sesuatunya

diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing calon anggota legislatif.

Dalam usaha penerapan strategi komunikasi politik tersebut, ditemui kendala di lapangan yang dapat dibagi menjadi 2, yaitu kendala yang berasal dari dalam (internal), serta kendala yang berasal dari luar organisasi (eksternal). Kendala internal tersebut beberapa diantaranya adalah:

- a. Kader dan Pengurus yang minim pengalaman politik, menjadikan proses organisasi di DPD PSI Kota Parepare tidak berjalan sesuai dengan aturan. Terdapat banyak penyimpangan dari AD/ART partai yang terjadi didalamnya, seperti misalnya kepengurusan yang tidak dibekali oleh SK (Surat Keputusan) pengurus, tidak adanya agenda partai yang berjalan seperti penyaringan bacaleg, perkaderan, pembekalan kemampuan politik, dan lain sebagainya. Hal ini dinyatakan oleh salah seorang bekas pengurus "...kami sebagai pengurus tidak tahu menahu soal job desk kami, struktur yg tdk jelas, (bendahara) kami gak pernah lihat, sistem laporan keuangan tidak transparan dan tidak pernah ada LPJ masalah keuangan partai"¹. Imbas dari tidak berjalannya mekanisme penyaringan bacaleg sendiri adalah terpilihnya caleg yang bermasalah, yaitu atas nama Nurafni, yang dicurigai melakukan tindak pidana penggelapan uang arisan. Beberapa jabatan pengurus yang vital seperti

¹ Wawancara dengan Susanto Adriawan Natsir bekas Ketua DPC PSI Soreang

bendahara dan sekretaris tidak diisi oleh orang-orang yang kompeten setelah pengurus terdahulu mengundurkan diri maupun tidak aktif lagi. Kemudian tidak adanya laporan keuangan dan transparansi dalam PSI kota Parepare, apabila dibandingkan dengan DPD PSI di kota lainnya, namun tidak pernah ada penjelasan yang memadai terkait hal tersebut. Sementara laporan rutin keuangan adalah mekanisme wajib yang diatur didalam AD/ART PSI. Konflik seperti ini tidak hanya dialami oleh PSI kota Parepare, namun konflik serupa ternyata juga terjadi di PSI Bekasi (indopos.co.id, 2019) dan PSI Nusa Tenggara Barat (hariannusa.com, 2018). Selain itu tidak ada mekanisme evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa agenda partai sudah berjalan, baik agenda internal maupun agenda eksternal.

- b. Proses komunikasi yang tidak berjalan dengan baik antara pengurus DPD PSI Kota Parepare, sehingga menimbulkan konflik internal diantara anggota-anggota PSI Kota Parepare. Beberapa konflik internal tersebut diantaranya adalah pemecatan beberapa anggota partai PSI Kota Parepare oleh ketua DPD PSI Kota Parepare secara sepihak tanpa melalui mekanisme kepartaian yang berlaku², ketidakpercayaan anggota-anggota PSI

Kota Parepare terhadap ketua DPD PSI Kota Parepare, dan lain sebagainya.

- c. Kondisi psikologis sebagai orang muda dengan kondisi emosi yang masih sering labil, ditambah dengan tidak adanya tokoh senior yang dapat menjadi penengah didalam DPD PSI Kota Parepare, turut menjadi penyebab konflik internal yang mengakibatkan PSI kota Parepare tidak berfungsi sebagaimana-mestinya. Kondisi ini diperparah dengan pengunduran diri kader-kader partai tersebut, sehingga roda kepartaian menjadi pincang (Makassar.tribunnews.com, 2019).

Adapun kendala eksternal yang dihadapi, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitaan di media terkait beberapa pernyataan elit PSI yang kontroversial, contohnya penolakan terhadap perda syariah maupun penolakan terhadap praktek poligami dan larangan poligami bagi kader-kader PSI. Meskipun pernyataan tersebut apabila dilihat secara keseluruhan sebenarnya merupakan pernyataan yang wajar (mis. penolakan terhadap perda syariah yang bersifat diskriminatif, seperti adanya peraturan jam malam dan peraturan daerah berdasarkan agama yang membatasi gerak kaum perempuan (merdeka.com, 2019), maupun larangan poligami bagi kader PSI yang merupakan hak partai dan tidak melanggar HAM (kompas.com, 2018) namun memberikan kesan negatif terhadap PSI

² Wawancara dengan Mifta Novianti Putri, bekas Pengurus DPD PSI Parepare

(mis. di cap sebagai partai anti agama) (republika.co.id, 2018).

- b. Adanya resistensi masyarakat terhadap PSI sebagai akibat dari terbentuknya opini publik yang negatif. Dalam salah satu survey litbang Kompas, PSI menjadi partai baru yang paling tinggi tingkat resistensi atau penolakan dari masyarakat, yaitu mencapai 5.6%. Angka tersebut sangat tinggi apabila dibandingkan dengan partai baru lain seperti Perindo dengan resistensi sebesar 1,9 persen, kemudian partai Berkarya dengan angka resistensi sebesar 1,3 persen, dan terakhir Garuda yang nilai resistensinya 0,9 persen (merdeka.com, 2019).
- c. Adanya persaingan dari partai-partai politik lain.

Kendala-kendala tersebut menyebabkan perolehan suara PSI kota Parepare pada pemilihan legislatif 2019 terbilang sangat rendah. Dari 3 daerah pemilihan, PSI kota Parepare hanya memperoleh 159 suara di dapil I dengan jumlah caleg 3 orang, 84 suara di dapil II dengan jumlah caleg 3 orang, dan 43 suara di dapil III dengan jumlah caleg 4 orang (kpu.go.id, 2019), dari total jumlah DPT kota Parepare sebanyak 99.111 orang. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan mantan pengurus dan anggota PSI kota Parepare yang masih berumur dibawah 35 tahun, keseluruhannya menyatakan bahwa mereka masih ingin berkiprah di dunia politik, meskipun mungkin tidak dalam kapasitas sebagai anggota PSI kota Parepare lagi. Mereka juga

berpendapat bahwa konflik yang terjadi serta mis-manajemen partai pada dasarnya terjadi akibat ulah oknum tertentu, dan bukan merupakan kesalahan partai tersebut secara struktural. Namun mereka juga menyayangkan mengapa kekisruhan di PSI Kota Parepare tidak mendapatkan perhatian langsung dari struktur PSI yang lebih tinggi, baik itu dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PSI Sulsel, ataupun dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia, meskipun mereka sudah beberapa kali melaporkan hal tersebut, baik secara langsung, maupun melalui laman media sosial resmi PSI.

SIMPULAN

Sebagai partai politik baru di Parepare, Partai Solidaritas Indonesia Kota Parepare mengalami kendala dalam pelaksanaan strategi komunikasi politiknya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman politik para anggotanya, tidak berjalannya fungsi edukasi politik partai, dan ulah oknum tertentu di dalamnya. Imbasnya adalah minimnya suara yang diperoleh PSI kota Parepare, sehingga PSI kota parepare tidak berhasil memenuhi tujuan jangka pendek strategi komunikasi politik partai untuk menempatkan wakil mereka sebagai anggota DPRD Kota Parepare. Namun PSI kota Parepare dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, dalam bentuk menjadikan mereka sebagai anggota partai maupun sebagai simpatisan. Komposisi pengurus maupun bacaleg PSI Kota Parepare yang sepenuhnya terdiri dari anak muda menjadi bukti nyata bahwa PSI Kota

Parepare mendorong keterlibatan anak muda dan pemilih pemula dalam proses politik.

Namun kebijakan tersebut kemudian berbalik menjadi merugikan mereka, sebab minimnya pengalaman organisasi politik para pengurus dan anggotanya menjadikan agenda kepartaian tidak berjalan lancar, dan juga menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan organisasi. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya penyelesaian ataupun intervensi langsung dari DPW maupun DPP PSI, yang berakibat pada hengkangnya kader-kader PSI kota Parepare tersebut. Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi PSI di daerah lain, terutama di Jawa. Sebagai contoh, DPD PSI DKI Jakarta justru berhasil mendudukan kadernya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, meskipun mereka berusia muda dan baru pertama kali mendaftar sebagai calon anggota DPRD. Meskipun demikian, para kader-kader maupun simpatisan PSI kota Parepare ini sendiri menyatakan tetap akan berkecimpung didalam dunia politik, sehingga PSI kota Parepare dapat dikatakan berhasil dalam menstimulasi ketertarikan kelompok pemilih pemula terhadap proses dan dinamika politik.

Untuk kedepannya, Partai Solidaritas Indonesia masih memiliki peluang yang signifikan untuk menjadi partai besar di Indonesia. Namun ada beberapa hal dapat menjadi masukan, yaitu proses seleksi pengurus partai perlu diperketat, terutama untuk anggota Dewan Pengurus Daerah di luar pulau Jawa, tentunya dengan mengedepankan asas kapabilitas dan transparansi. Kemudian edukasi politik dan proses perkaderan

bagi para anggota partai perlu harus menjadi agenda rutin, agar manajemen agenda partai dapat berjalan dengan efisien dan transparan. Hal ini juga penting sebagai dasar pengetahuan agar kemampuan komunikasi politik kader dan pengurus PSI dapat semakin ditingkatkan. Selanjutnya Dewan Pengurus Wilayah maupun Dewan Pengurus Pusat PSI perlu meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengurus Daerah, serta membuka saluran komunikasi yang mengedepankan asas kesamaan hak atau egaliter sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya praktik-praktik penyimpangan dalam penyelenggaraan agenda partai tersebut. Dan yang terakhir adalah memperketat proses seleksi dan penjarangan kader di daerah-daerah diluar pulau Jawa, agar terjadi pemerataan kualitas dan kompetensi kader PSI kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani, Hendra. 2015. *Political Communication Channel and The Phenomenon of Political Communicators in Indonesia*. Communication Sphere, Vol.1, No.1 (2015) ISSN: 2477-1562
- Al Hasan, Muhammad. (2018, 28 April). PSI Seleksi 150 Bacaleg. Diakses dari <https://psi.id/berita/2018/04/29/psi-seleksi-150-bacaleg/>
- Aminullah, Akhirul. 2010. Strategi Komunikasi Politik Partai Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif 2009. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Anwar, Alfiansyah. (2018, 26 November). Caleg Muda Parepare Bertemu, Ini yang Dibahas. Diakses dari <https://www.pijarnews.com/caleg-muda-parepare-bertemu-ini-yang-dibahas/>
- Aprilia, Merina. Surya, Iman. Dyastari, Letizia. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015 Di Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang. E-Journal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (3): 1281-1294 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak)
- Azhar, A.A. 2018. *Marketing of Political Communication Created by National Mandate Party (PAN) in General Election 2005-2015*, Analisis Strategi Komunikasi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula (Studi Kasus Psi Parepare)

- North Sumatra, Indonesia*. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Volume I, No 2, June 2018, Page: 93-106 e-ISSN: 2615-3076(Online), p-ISSN: 2615-1715(Print)
- Chambali, Irfandi Imam. 2017. Partisipasi Politik Masyarakat Miskin Kota Dalam Pilkada Tahun 2015 Di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang.
- Dahlan, Ahmad Kamal. (2019, 8 Juli). Wawancara Pribadi
- Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta
- Fadil, Iqbal. (019, 21 Maret). Survei Litbang Kompas: PSI Partai Baru dengan Resistensi Paling Tinggi. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/survei-kompas-psi-partai-baru-dengan-resistensi-paling-tinggi.html>
- Fitriyah. 2020. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik Vol.11, No. 1, 2020. doi:10.14710/politika.11.1.2020.1-17
- Heryanto. (2019, 21 Oktober). Banyak Kejanggalan dan Tidak Beretika, Enam Ketua DPC PSI Bekasi Mundur. *Indopos* Diakses dari <https://indopos.co.id/read/2019/10/21/202071/banyak-kejanggalan-dan-tidak-beretika-enam-ketua-dpc-psi-bekasi-mundur/>
- Iswadi, Dedi. (2019, 5 Juli). Wawancara Pribadi
- James C.Carolyn., James P. (2017) *Systemism and Foreign Policy Analysis: A New Approach to the Study of International Conflict*. In: Yetiv S., James P. (eds) *Advancing Interdisciplinary Approaches to International Relations*. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-40823-1_10
- Laman Penetapan Hasil Wilayah. Diakses dari <https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-hasil/wilayah/>
- Morlino, Leonardo. Badie, Bertrand. Berg-Schlosser, Dirk. 2020. *The SAGE Handbook of Political Science*. SAGE
- Mukhtar. 2013. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif. Jakarta : GP Press Group
- Mulyadi. (2019, 6 Februari). 3 Alasan Kader & Caleg PSI Ramai-ramai Mundur di Parepare, Duit Partai hingga Ada yang Amburadul. *Tribunnews*. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/02/06/3-alasan-kader-caleg-psi-ramai-ramai-mundur-di-parepare-duit-partai-hingga-ada-yang-amburadul>
- Mulyadi. (2019, 17 Maret). Belasan Caleg Lintas Partai di Parepare Komitmen Tolak Politik Uang. *Tribunnews*. Diakses dari <https://makassar.tribunnews.com/2019/03/17/belasan-caleg-lintas-partai-di-parepare-komitmen-tolak-politik-uang>
- komitmen-tolak-politik-uang diakses pada tanggal 6 September 2019
- Nasrudin, Muhammad. (2018, 21 September). Bacaleg PSI Akan Berikan Pembekalan, Dihadiri Gubernur Sulsel. Diakses dari <https://makassar.terkini.id/bacaleg-psi-berikan-pembekalan-dihadiri-gubernur-sulsel/>
- Nimmo, Dan. 2010. Komunikasi Politik Khalayak Dan Efek. Malang: Remaja Rosdakarya.
- Novianti Putri, Mifta. (8 Juli 2019). Wawancara Pribadi.
- Pawito, 2017. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS
- Prabowo, Edhy. Sulismadi. Safri. 2016. Theoretical Review of Political Communication and Political Achievement Strategy. *International Journal of Management and Administrative Sciences (IJMAS)* (ISSN: 2225-7225) Vol. 4, No. 04, (22-30)
- Rahmatullah, Ahmar. (2019, 1 Juli). Wawancara pribadi.
- Rasyid, Satria Z. (2018, 23 September). Caleg PSI NTB Ramai-Ramai Mundur. Diakses dari <https://hariannusa.com/2018/09/23/caleg-psi-ntb-ramai-ramai-mundur/>
- Ristianto, Christoforus. (2018, 15 Desember). PSI: Larangan Poligami Tidak Melanggar HAM. *Kompas*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/15/14033381/psi-larangan-poligami-tidak-melanggar-ham>
- Rosana, Ellya. 2012. Partai Politik Dan Pembangunan Politik. *Jurnal TAPIs* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012
- Sadewo, Joko. (2018, 19 November). Sikap PSI Dinilai Sebagai Bentuk Fobia Agama. *Republika*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/11/19/pifw9d318-sikap-psi-dinilai-sebagai-bentuk-fobia-agama>
- Saifullah Sukri, Muhammad. (2019, 8 Juli). Wawancara Pribadi.
- Semetko, A. Holli. Scammel, Margaret. 2012. *The SAGE Handbook of Political Communication*. SAGE Publication Ltd.
- Sugiyono. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA
- Suryasumirat, Ratu Annisa. (2018, 19 November). Ketum PSI Tegaskan Tolak Perda Syariah yang Diskriminatif. *Merdeka*. Diakses dari <https://www.merdeka.com/politik/ketum-psi-tegaskan-tolak-perda-syariah-yang-diskriminatif.html>
- Susanto, Adriawan. (2019, 3 Juli). Wawancara Pribadi
- Sutanto. 2011. Strategi Partai Demokrat dalam Pemenangan Pemilu Legislatif 2009 di Kota Semarang. Universitas Negeri Semarang

- Thaib, Erwin Jusuf. 2019. Komunikasi Politik Ditinjau Dari Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Politik. FARABI Jurnal Pemikiran Konstruktif Bidang Filsafat dan Dakwah. ISSN 1907 – 0993 E ISSN 2442 – 8264 Vol. 16 No. 1.
- Varma, S.P. 2016. Teori Politik Modern. Rajagrafindo. ISBN: 979-421-109-5